

DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, John W. 2015. *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Hasan, M. Iqbal. 2002. *Pokok – Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Bogor. Ghalia Indonesia.
- Haris, Syamsuddin. 2007. *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Jakarta. LIPI Press.
- Indrajit, Richardus Eko. 2006. *Electronic Government : Konsep Pelayanan Publik Berbasis Internet dan Teknologi Informasi*. Aptikom.
- Krina, Loina Lalolo. 2003. *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi*. Sekretariat Good Public Governance. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS).
- Moleong, Lexy. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. PT Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja.
- Rahardjo, Mudjia. 2010. *Triangulasi Dalam Penelitian Kualitatif*. mudjiarahardjo.uin-malang.ac.id. Diakses Pada Tanggal 13 Maret 2017 Pukul 09.55 WIB.
- Richardus Eko Indrajit, Dudy Rudianto dan Akbar Zainuddin. 2007. *Electronic Government : Strategi Implementasi di Berbagai Negara*. Aptikom.
- Santosa, Pandji. 2008. *Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Good Governance*. Bandung. Refika Aditama.
- Sedarmayanti. 2004. *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik)*. Bagian Kedua. Bandung. CV. Mandar Maju.
- Sudjana, Nana. 2009. *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah*. Bandung. Sinar Baru Algesindo.
- Tim Penyusun. 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta. Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Widodo, Joko. 2010. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang. Bayumedia.
- Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Undang – Undang 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal
- Undang – Undang 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Penanaman Modal

Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah

Peraturan Bupati Kendal Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian wewenang Bupati Kendal di Bidang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kendal Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kendal